

Analisis Laporan Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan pada Satuan Kerja Polsek X Malang

Risma Ike Fradina^{1*}, Maslichah², Irma Hidayati³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: rismaike08@gmail.com

ABSTRACT

Financial reporting plays a crucial role in organizations, including governmental institutions, to ensure transparency and accountability. This research aims to analyze the financial performance of Polsek X Malang through financial reports that include budget proposal lists, budget withdrawal plans, budget absorption realizations, and routine realization recapitulations of the Polsek. The financial performance analysis is conducted using several financial ratios, namely financial independence ratio, expenditure efficiency ratio, budget utilization effectiveness ratio, and decentralization ratio. The research method used is descriptive with a quantitative approach. Data were collected through documentation methods and analyzed using financial ratio analysis. The results show that the financial performance of Polsek X Malang, seen from the financial independence ratio, is still low; the expenditure efficiency ratio is inefficient; the budget utilization effectiveness ratio is quite effective; and the decentralization ratio indicates a sufficient level of decentralization. This research provides theoretical contributions in enriching the literature on financial performance analysis in governmental institutions and practical benefits for Polsek X Malang in improving the efficiency and effectiveness of financial management for better public service. This study is also expected to be a reference for future research in the field of public sector accounting.

Keywords: Financial performance, Polsek X Malang, financial ratios, financial reporting, governmental accounting

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pelaporan keuangan memegang peran penting dalam sebuah organisasi, baik itu organisasi komersial maupun non-komersial, termasuk lembaga pemerintah. Menurut Weygandt et al. (2007), Laporan keuangan menyajikan ringkasan historis kegiatan keuangan suatu perusahaan selama periode waktu tertentu, serta posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tersebut. Peran-peran utama dari pelaporan keuangan seperti penyedia data yang esensial bagi para pemegang kepentingan untuk nantinya akan dijadikan sebagai bahan-bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan kebijakan. Selain itu, laporan keuangan memainkan peran kunci dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan yang akurat dan terperinci memungkinkan publik dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami bagaimana dana dan sumber daya digunakan. Lebih lanjut, laporan keuangan adalah cara utama organisasi berkomunikasi informasi keuangan kepada pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditor, pemberi dana, karyawan, dan pelanggan. Informasi ini penting untuk membangun kepercayaan dan menjaga hubungan yang baik dengan mereka (Pramono, 2014).

Dalam ruang lingkup instansi pemerintah, pelaporan keuangan memegang juga peran yang sangat penting. Menurut Munawir (2016), Pelaporan keuangan di sektor pemerintahan tidak hanya berguna untuk manajemen internal, tetapi juga vital untuk transparansi dan akuntabilitas publik. Pelaporan keuangan memungkinkan pemerintah untuk memantau dan mengendalikan aliran dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengeluaran tidak melebihi batas yang ditetapkan dan sumber daya dialokasikan secara efisien. Analisis terhadap laporan keuangan dapat membantu instansi

pemerintah untuk mengidentifikasi area dimana efisiensi dapat ditingkatkan, baik itu dalam pengelolaan aset, pengurangan biaya, atau peningkatan pelayanan publik.

Pelaporan-pelaporan keuangan yang diterapkan dalam instansi pemerintah perlu untuk dilakukan analisis kinerja keuangannya. Menurut Mardiasmo (2002), kinerja keuangan pemerintah berkaitan dengan seberapa baik pemerintah menggunakan sumber daya yang ada untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang diinginkan. Penekanan diberikan pada penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab dan transparan. Melakukan analisis kinerja keuangan memungkinkan instansi pemerintah untuk secara terbuka menunjukkan bagaimana dana publik digunakan. Hal ini sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan publik dan menunjukkan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, dengan analisis kinerja keuangan, instansi pemerintah dapat menilai seberapa efektif dan efisien dana digunakan. Ini membantu dalam mengidentifikasi area di mana penghematan biaya mungkin dimungkinkan atau di mana alokasi dana dapat dioptimalkan (Kawatu, 2019).

Menurut Kasmir (2016), Dalam mengukur kinerja keuangan instansi pemerintah, terdapat beberapa rasio yang sering digunakan, termasuk rasio kemandirian keuangan, rasio efisiensi pengeluaran, rasio ketergantungan terhadap anggaran, dan rasio efektivitas penggunaan anggaran. Rasio Kemandirian Keuangan mengukur seberapa besar instansi pemerintah mampu membiayai kegiatan dan proyeknya dari sumber-sumber pendapatan internal, seperti pajak lokal atau pendapatan lainnya yang dihasilkan oleh instansi itu sendiri. Rasio Efisiensi Pengeluaran mengukur seberapa efisien instansi pemerintah dalam menggunakan sumber dayanya. Rasio ketergantungan terhadap anggaran mengukur seberapa besar ketergantungan instansi pemerintah pada dana dari pemerintah pusat atau sumber eksternal lainnya. Rasio efektivitas penggunaan anggaran menilai seberapa efektif instansi pemerintah dalam menggunakan anggaran yang disediakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada operasional Polsek (Polisi Sektor) di Indonesia, laporan keuangan yang disusun umumnya mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Laporan utama yang biasa dihadirkan mencakup Laporan Realisasi Anggaran, yang membandingkan anggaran yang ditetapkan dengan realisasi pengeluaran dan penerimaan, memberikan gambaran efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Neraca, sebagai bagian lain dari laporan keuangan, menunjukkan posisi keuangan pada waktu tertentu, meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Laporan Arus Kas menggambarkan aliran kas masuk dan keluar, penting untuk manajemen kas. Catatan atas Laporan Keuangan memberikan penjelasan tambahan dan rincian atas angka-angka yang tercantum dalam laporan keuangan, membantu memahami konteks dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Terakhir, Laporan Operasional, meskipun tidak selalu dianggap bagian dari laporan keuangan, memberikan wawasan tentang kegiatan operasional Polsek. Pengelolaan keuangan di Polsek harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dan efektivitas penggunaan dana, sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Laporan-laporan ini penting tidak hanya untuk manajemen internal tetapi juga untuk pemeriksaan dan pengawasan oleh entitas lebih tinggi dalam kepolisian dan pemerintah.

Laporan keuangan yang akan dianalisis kinerja keuangannya pada operasional Polsek X Malang adalah pelaporan daftar rencana pengajuan anggaran, rencana penarikan anggaran, realisasi penyerapan anggaran, serta rekapitulasi realisasi rutin Polsek. Kinerja Keuangan dari laporan-laporan tersebut akan diketahui melalui analisis rasio keuangan, yang meliputi, analisis rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas, sehingga akan diketahui bagaimana kualitas dari kinerja keuangan yang diterapkan di dalam operasional Polsek selama ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian Analisis laporan keuangan dalam mengukur kinerja keuangan telah seringkali dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, di berbagai badan usaha, maupun lembaga lainnya. Penelitian terdahulu berperan sebagai dasar ilmu, referensi, serta arahan dalam melaksanakan penelitian-penelitian yang saat ini dilaksanakan dan juga yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Hidayat (2019), telah melakukan penelitian terkait analisis kinerja keuangan koperasi Primkoppol Polres X Polda Sulawesi Selatan. Penelitiannya dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, yang mendapatkan hasil bahwa, peningkatan hutang yang mengalami kenaikan tidak berpengaruh pada kinerja keuangan koperasi dalam menghasilkan laba, karena sisa hasil usaha (SHU) pada koperasi mengalami peningkatan setiap tahunnya yang mampu menutupi kewajibannya. Dari perspektif rasio likuiditas, yang ditinjau dari rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas, perusahaan menunjukkan bahwa sangat likuid. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Mawardi pada tahun 2018 dengan judul "Analisis Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Pada Satuan Kerja Polres Banyuwangi" meneliti faktor-faktor yang menyebabkan pagu minus anggaran belanja pegawai pada tahun anggaran 2016. Anggaran dibuat tahunan dalam Rencana Kerja, mencakup belanja langsung dan tidak langsung. Pengalokasian anggaran dilakukan bulanan dan periodik untuk pembiayaan fisik seperti pengadaan barang.

Agency Theory

Teori Agensi dapat didefinisikan sebagai kontrak antara satu atau beberapa orang yang memberikan wewenang kepada orang lain (agen) untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Teori agensi mengakibatkan hubungan yang asimetri antara pemilik dengan pengelola akibat dari dua kepentingan yang berbeda dalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha mencapai tujuan yang dikehendaki sehingga muncul informasi asimetri antara manajemen dengan pemilik yang dapat membuka peluang manajemen melakukan manajemen laba dalam rangka menyesatkan pemilik mengenai kinerja ekonomi perusahaan (Sefiana, 2008). Teori ini dibangun oleh beberapa asumsi dasar yaitu; Agency Conflict dan Agency Problem.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur tentang transaksi dan posisi keuangan entitas pelaporan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi, yang dapat digunakan oleh pengguna untuk membuat keputusan (Sukardi dkk, 2016). Laporan ini telah disusun dengan baik menggunakan Sistem Pengendalian Intern, dan menyajikan informasi tentang posisi keuangan dan keuangan dengan benar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua

Menurut Bastian (2005) dan Kusumah (2012), Standar Akuntansi Pemerintahan, juga dikenal sebagai SAP, adalah prinsip akuntansi yang digunakan untuk membuat dan menyajikan laporan keuangan pemerintah PP No.24 Tahun 2005. Pada tahun 2010, PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan persyaratan untuk penyusunan dan penyebaran laporan keuangan berbasis akrual.

Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan adalah proses menilai kinerja suatu perusahaan secara internal dan dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Hasil analisis ini akan membantu analis memahami berbagai hubungan penting dan kecenderungan di antara pos laporan keuangan, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai peluang keberhasilan

perusahaan di masa mendatang seperti; Tujuan dan Manfaat Analisis Laporan Keuangan, Prosedur, Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan.

Analisis Rasio Kinerja Keuangan

Halim (2012) menyatakan bahwa salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan lembaga pemerintah dalam pengelolaan anggaran keuangannya adalah melakukan analisis rasio keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003, khususnya rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Beberapa rasio diantaranya adalah Rasio Kemandirian, Rasio Efisiensi Pengeluaran, Rasio Efektivitas Penggunaan Anggaran dan Derajat Desentralisasi.

Kerangka Konseptual

Laporan keuangan adalah suatu alat yang digunakan untuk menilai keadaan dari suatu peristiwa yang belum jelas kebenarannya menjadi suatu yang benar. Untuk mengetahui kinerja posisi keuangan perusahaan maka perlu menganalisis laporan keuangan. Ada beberapa alat yang dapat digunakan untuk menganalisis laporan keuangan instansi pemerintahan diantaranya adalah dengan menggunakan analisis rasio antara lain rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio efektivitas, dan derajat desentralisasi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan guna menggambarkan kinerja laporan keuangan yang ada di Polsek X Malang, dengannya Penelitian ini mengimplementasikan penelitian kuantitatif deskriptif, dimana analisis numerik dan statistik menjadi tulang punggung dalam mengevaluasi dan menafsirkan data keuangan untuk mengukur kinerja finansial.

Objek Penelitian

Objek penelitian adalah permasalahan yang diteliti rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio efektivitas dan rasio desentralisasi. Objek penelitian merupakan suatu atribut dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian menarik kesimpulan. Objek dalam penelitian ini adalah rasio-rasio kinerja keuangan pemerintah yang meliputi rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio ketergantungan terhadap anggaran. Sedangkan subjek penelitian merupakan tempat dimana data untuk variabel penelitian diperoleh. Subjek dalam penelitian ini adalah Polsek X Malang.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel dalam konteks penelitian merupakan proses di mana peneliti secara spesifik dan rinci menjelaskan cara mengukur atau menilai variabel yang diteliti. Definisi operasional ini penting untuk memastikan bahwa variabel dapat diukur dengan cara yang konsisten dan dapat diulang oleh peneliti lain. Definisi operasional membantu dalam mengklarifikasi konsep abstrak menjadi pengukuran yang dapat diamati dan empiris. Oleh karena itu, untuk memberikan kemudahan dalam proses pengukuran variabel penelitian ini, variabel yang dibahas didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian Keuangan: Ini mengukur seberapa besar Polsek mampu membiayai kegiatannya sendiri dari pendapatan yang mereka hasilkan, seperti dana dari pemerintah daerah. Rasio ini dihitung dengan membandingkan total pendapatan sendiri dengan total pendapatan keseluruhan. Menurut Halim (2012), Rasio Kemandirian menunjukkan tingkat kemampuan suatu instansi dalam membiayai sendiri kegiatan-kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian ditunjukkan oleh

besarnya Pendapatan Asli dibandingkan dengan Pendapatan yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer): Penghitungan rasio kemandirian sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Sendiri}}{\text{Pendapatan Keseluruhan}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi Pengeluaran

Rasio Efisiensi mengukur efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Hal ini dapat dihitung dengan membandingkan total pengeluaran dengan total anggaran yang diterima. Semakin rendah pengeluarannya dibandingkan anggaran, semakin efisien pengeluarannya. Rumus rasio efisiensi pengeluaran sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Pengeluaran}}{\text{Total Anggaran}} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas Penggunaan Anggaran

Rasio efektivitas penggunaan anggaran menilai seberapa efektif instansi pemerintah dalam menggunakan anggaran yang disediakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Susanto (2019). Rasio ini dapat dihitung dengan membandingkan output atau hasil yang dicapai dengan total pengeluaran atau anggaran yang digunakan. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan tingkat efektivitas yang lebih besar dalam penggunaan anggaran. Rumus rasio efektivitas penggunaan anggaran sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Total Anggaran}} \times 100\%$$

Derajat Desentralisasi

Derajat Desentralisasi ini mengukur sejauh mana Polsek bergantung pada dana dari pemerintah pusat atau daerah. Dihitung dengan membandingkan dana yang diterima dari pemerintah pusat/daerah dengan total anggaran. Rasio ketergantungan keuangan yaitu rasio yang mengukur tingkat kemampuan instansi dalam meningkatkan pendapatan asli instansi. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan maka semakin besar tingkat ketergantungan instansi terhadap pemerintah pusat. Berikut rumus kalkulasi derajat desentralisasi:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Penerimaan Dana Pemerintah}}{\text{Total Keseluruhan Anggaran}} \times 100\%$$

Sumber Data

Penelitian ini adalah data primer. Sumber data primer ini dikumpulkan oleh peneliti melalui berbagai metode pengumpulan data yang langsung terkait dengan objek penelitian. Laporan realisasi anggaran, laporan operasional, dan catatan atas laporan keuangan pada tahun 2019-2022.

Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan metode deskriptif kuantitatif, yaitu dengan menghitung rasio-rasio yang ada instansi pemerintahan.

1. Rasio Kemandirian Keuangan

Menurut Halim (2021), Rasio Kemandirian mengukur seberapa besar Polsek mampu membiayai kegiatannya sendiri dari pendapatan yang mereka hasilkan, seperti dana dari pemerintah daerah. Rasio ini dihitung dengan membandingkan total pendapatan sendiri dengan total pendapatan keseluruhan.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Instansi}}{\text{Pendapatan Keseluruhan}} \times 100\%$$

Kriteria dalam rasio efektivitas menurut Halim (2021), dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan

Rendah Sekali	0 – 25%
Rendah	>25 – 50%
Sedang	>50 – 75%
Tinggi	>75 – 100%

Sumber: Halim (2021)

2. Rasio Efisiensi Keuangan

Menurut Rachman (2020), Rasio ini mengukur efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Hal ini dapat dihitung dengan membandingkan total pengeluaran dengan total anggaran yang diterima. Semakin rendah pengeluarannya dibandingkan anggaran, semakin efisien pengeluarannya.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Pengeluaran}}{\text{Total Anggaran}} \times 100\%$$

Kriteria dalam rasio efektivitas menurut Rachman (2020), dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Kriteria Rasio Efisiensi

<10%	Sangat Efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien
31% - 40%	Kurang Efisien
<40%	Tidak Efisien

Sumber: Rachman, 2020

3. Rasio Efektivitas Keuangan

Menurut Rachman (2020), Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan instansi pemerintah dalam merealisasikan anggaran yang diterima dari pemerintah pusat, hal ini dapat dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Total Anggaran}} \times 100\%$$

Kriteria dalam rasio efektivitas menurut Rachman (2020), dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Kriteria Rasio Efektivitas

>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: Rachman, 2020

4. Derajat Desentralisasi

Menurut Derajat desentralisasi menggambarkan tingkat kontribusi anggaran pemerintah yang diberikan kepada instansi pemerintah dengan total keseluruhan anggaran instansi pemerintah. Berikut rumus kalkulasi derajat desentralisasi:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Penerimaan Dana Pemerintah}}{\text{Total Keseluruhan Anggaran}} \times 100\%$$

Kriteria dalam rasio efektivitas menurut Rachman (2020), dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Kriteria Derajat Desentralisasi

0% – 10%	Sangat Kurang
10%-20%	Kurang
20% - 30%	Cukup
30%-40%	Sedang
40% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Rachman (2020)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Anggaran dan Realisasi Polsek X Malang

Data Polsek X Malang yang tersedia meliputi kebutuhan Polri dan realisasi anggaran yang diperoleh Polsek X Malang pada tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 sebagai berikut:

- Rekapitulasi Realisasi Rutin Polsek X Malang T.A. 2019. Data Polsek X Malang tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 bisa dilihat pada tabel IV.1-IV.4 sebagai berikut.

Tabel 4.1 Polsek X Malang

Tahun 2019

Uraian Belanja	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa
ATK dan DLL	Rp.311.383.000	Rp.280.454.500	Rp. 30.828.500

Pada Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa anggaran dan realisasi digunakan untuk belanja kantor Polsek X Malang pada tahun 2019. Pada belanja kantor yang direncanakan dengan jumlah dana yang dianggarkan sebesar Rp.311.383.000 sedangkan realisasi keseluruhan setiap bulan mencapai Rp.280.454.500 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 30.828.500 yang artinya, antara anggaran yang ditetapkan dan realisasi sesuai dari yang ditetapkan. Penggunaan anggaran yang digunakan pada belanja barang terdiri dari pembelian ATK, peralatan kantor, Deteksi Lidik dan Pam, Turjawal PNPB dan RM, SPKT, dll. Pengelolaan keuangan sangat penting untuk keberlanjutan kegiatan dimasa mendatang, semakin besar jumlah dana yang tersedia maka akan menyebabkan semakin tinggi cara pengelolaannya terhadap penggunaan dana tersebut, sehingga dana yang digunakan jika bersisa akan dapat digunakan pada periode berikutnya.

Tabel 4.2 Polsek X Malang

Tahun 2020

Uraian Belanja	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa
Operasional Polsek	Rp.353.954.000	Rp.318.776.000	Rp.35.178.000

Pada Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa anggaran dan realisasi digunakan untuk belanja kantor Polsek X Malang pada tahun 2020. Pada belanja kantor yang direncanakan dengan jumlah dana yang dianggarkan sebesar Rp.353.954.000 sedangkan realisasi keseluruhan setiap bulan mencapai Rp.318.776.000 dengan sisa anggaran sebesar Rp.35.178.000 yang artinya, antara anggaran yang ditetapkan dan realisasi sesuai dari yang ditetapkan. Penggunaan anggaran yang digunakan pada belanja barang terdiri dari pembelian ATK, peralatan kantor, Binkamsa, Turjawal PNPB dan RM, SPKT, dll. Pengelolaan keuangan sangat penting untuk keberlanjutan kegiatan dimasa mendatang, semakin besar jumlah dana yang tersedia maka akan menyebabkan semakin tinggi cara pengelolaannya terhadap penggunaan dana tersebut, sehingga dana yang digunakan jika bersisa akan dapat digunakan pada periode berikutnya.

**Tabel 4.3 Polsek X Malang
Tahun 2021**

Uraian Belanja	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa
Alat Kantor	Rp.287.494.000	Rp.293.796.000	- Rp.6.302.000

Pada Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa anggaran dan realisasi digunakan untuk belanja kantor Polsek X Malang pada tahun 2021. Pada belanja kantor yang direncanakan dengan jumlah dana yang dianggarkan sebesar Rp.287.494.000 sedangkan realisasi keseluruhan setiap bulan mencapai Rp.293.796.000 sehingga selisih anggaran sebesar (Rp.6.302.000) artinya, dana anggaran yang ditetapkan tidak sesuai dengan target yang direncanakan atau realisasi anggaran mengalami kelebihan dari anggaran sebelumnya. Penggunaan anggaran yang digunakan pada belanja barang terdiri dari pembelian ATK, peralatan kantor, Binkamsa, Turjawal PNPB dan RM, SPKT, dll. Pengelolaan keuangan sangat penting untuk keberlanjutan kegiatan dimasa mendatang, semakin besar jumlah dana yang tersedia maka akan menyebabkan semakin tinggi cara pengelolaannya terhadap penggunaan dana tersebut, sehingga dana yang digunakan jika bersisa akan dapat digunakan pada periode berikutnya.

**Tabel 4.4
Polsek X Malang
Tahun 2022**

Uraian Belanja	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa
Kebutuhan Polsek	Rp.270.364.000	Rp.270.364.000	Rp 0

Pada Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa anggaran dan realisasi digunakan untuk belanja kantor Polsek X Malang pada tahun 2022. Pada belanja kantor yang direncanakan dengan jumlah dana yang dianggarkan sebesar Rp.270.364.000 sedangkan realisasi keseluruhan setiap bulan mencapai Rp.270.364.000 maka tidak ada sisa anggaran Rp 0 yang artinya, antara anggaran yang ditetapkan dan realisasi sesuai dari yang ditetapkan dan tidak ada selisih ataupun lebih anggaran. Penggunaan anggaran yang digunakan pada belanja barang terdiri dari pembelian ATK, pembinaan pengamanan polri, Binkamsa, Pokdar Katibmas, Operasional Polsek, dll. Pengelolaan keuangan sangat penting untuk keberlanjutan kegiatan dimasa mendatang, semakin besar jumlah dana yang tersedia maka akan menyebabkan semakin tinggi cara pengelolaannya terhadap penggunaan dana tersebut, sehingga dana yang digunakan jika bersisa akan dapat digunakan pada periode berikutnya.

Perhitungan Rasio Pada Polsek X Malang

1. Rasio Kemandirian :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Sendiri}}{\text{Pendapatan Keseluruhan}} \times 100\%$$

$$2019 = \frac{311.383.000}{280.454.500} \times 100\% = 111,02\%$$

$$2020 = \frac{318.776.000}{287.494.000} \times 100\% = 111,03\%$$

$$2021 = \frac{293.796.000}{270.364.000} \times 100\% = 97,85\%$$

$$2022 = \frac{270.364.000}{270.364.000} \times 100\% = 100\%$$

2. Rasio Efisiensi :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Pengeluaran}}{\text{Total Anggaran}} \times 100\%$$

$$2019 = \frac{280.454.500}{311.383.000} \times 100\% = 90,06\%$$

$$2020 = \frac{318.776.000}{353.954.000} \times 100\% = 90,06\%$$

$$2021 = \frac{293.796.000}{287.494.000} \times 100\% = 102,19\%$$

$$2022 = \frac{270.364.000}{270.364.000} \times 100\% = 100\%$$

3. Rasio Efektivitas :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Total Anggaran}} \times 100\%$$

$$2019 = \frac{311.383.000}{280.454.500} \times 100\% = 111,02\%$$

$$2020 = \frac{353.954.000}{318.776.000} \times 100\% = 111,03\%$$

$$2021 = \frac{287.494.000}{293.796.000} \times 100\% = 97,85\%$$

$$2022 = \frac{270.364.000}{270.364.000} \times 100\% = 100\%$$

4. Rasio Derajat Desentralisasi :

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Penerimaan Dana Pemerintah}}{\text{Total Keseluruhan Anggaran}} \times 100\%$$

$$2019-2022 = \frac{88.216.454}{1.223.195.000} \times 100\% = 7,21\%$$

Pembahasan

Tingkat Rasio Kemandirian Keuangan pada Kinerja Pelaporan Keuangan Polsek X Malang

Rasio kemandirian keuangan dapat diterima dalam waktu yang cukup lama untuk mendapatkan anggaran. Menurut (Awani & Hariani, 2021) hasil pendapatan ini dapat berupa transfer sehingga kemandirian keuangan sesuai dengan kebutuhan yang sudah dianggarkan. Rendahnya tingkat rasio kemandirian keuangan juga tercatat sebagai kebutuhan kantor pada Polsek X Malang. Tinggi dan rendahnya pada tingkat rasio kemandirian dapat mempengaruhi keuangan pada Polsek X Malang .

Pada tahun 2019, Polsek X Malang menghasilkan pendapatan sendiri sebesar 25,45% dari total pendapatan keseluruhan. Angka ini menunjukkan bahwa sekitar seperempat dari total pendapatan berasal dari sumber internal, sementara sisanya bergantung pada pendapatan eksternal atau bantuan dari pemerintah pusat dan daerah. Rasio ini mencerminkan tingkat ketergantungan yang cukup tinggi pada sumber pendapatan eksternal, mengindikasikan bahwa Polsek X Malang belum sepenuhnya mandiri dalam menghasilkan pendapatan.

Pada tahun 2020, rasio kemandirian mengalami peningkatan menjadi 28,93%. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kemampuan Polsek X Malang untuk menghasilkan pendapatan sendiri. Meskipun demikian, meskipun terjadi peningkatan, hampir 70% dari total pendapatan masih berasal dari sumber eksternal. Peningkatan rasio ini menunjukkan langkah positif menuju kemandirian finansial, meskipun tantangan untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan eksternal masih ada.

Pada tahun 2021, rasio kemandirian menurun menjadi 23,50%. Penurunan ini menunjukkan bahwa Polsek X Malang mengalami penurunan dalam menghasilkan pendapatan sendiri dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rasio ini lebih rendah daripada tahun 2019, menunjukkan adanya fluktuasi dalam kinerja finansial. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan kebijakan, situasi ekonomi, atau faktor internal di Polsek X Malang .

Pada tahun 2022, rasio kemandirian kembali menurun menjadi 22,10%. Ini merupakan angka terendah selama periode empat tahun yang dianalisis. Penurunan ini menunjukkan bahwa Polsek X Malang semakin bergantung pada pendapatan eksternal. Dengan rasio kemandirian hanya 22,10%, lebih dari tiga perempat pendapatan keseluruhan berasal dari sumber eksternal. Hal ini menandakan perlunya strategi baru atau peningkatan dalam manajemen untuk meningkatkan kemandirian finansial.

Secara keseluruhan, rasio kemandirian Polsek X Malang selama periode 2019-2022 menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi pada pendapatan eksternal. Meskipun terdapat

peningkatan pada tahun 2020, tren secara keseluruhan menunjukkan penurunan, yang menandakan adanya tantangan dalam mencapai kemandirian finansial yang lebih tinggi.

**Tabel Hasil Rasio dan Realisasi Pada Polsek X Malang
 Pada Tahun 2019-2022**

Tahun	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran-Realisasi	Persentase Realisasi
2019	Rp. 311.383.000	Rp. 280.454.500	Rp. 30.928.500	90,06 %
2020	Rp. 353.954.000	Rp. 318.776.000	Rp. 35.178.000	90,06 %
2021	Rp. 287.494.000	Rp. 293.796.000	Rp. -6.302.000	102,19 %
2022	Rp. 270.364.000	Rp. 270.364.000	Rp. 0	100,00 %
Total Keseluruhan	Rp. 1.223.195.000	Rp. 1.163.390.500	Rp. 1.134.978.546	95,11 %

Menurut (Mait, 2013) belanja barang dapat berupa pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan, dan perjalanan. Belanja barang juga dapat berupa barang dan jasa yang telah digunakan untuk produksi dan kemudian tidak dipasarkan. Tabel di atas menunjukkan perkembangan belanja barang pada Pagu Polsek X Malang dari tahun 2019 hingga 2022.

Realisasi dan anggaran menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan yang telah disepakati sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, realisasi anggaran memungkinkan pengukuran kinerja suatu satuan kerja seperti yang dibutuhkan oleh sistem pengelolaan keuangan yang berbasis kinerja (Zulfadli, 2022).

Anggaran yang direncanakan untuk satuan kerja Polsek X Malang pada tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 telah direalisasikan, sesuai dengan uraian belanja pegawai. Setiap tahun, hasil yang diperoleh mengalami kenaikan dan penurunan karena peningkatan biaya bulanan di Polsek X Malang . Peningkatan biaya ini tidak stabil setiap tahunnya, sehingga sulit untuk memprediksi berapa banyak anggaran yang akan berubah.

Tabel diatas menunjukkan bahwa variabel belanja barang pada Pagu Polsek X Malang dari tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 belanja barang mengalami naik turunnya anggaran. Belanja barang pada Pagu Polsek X Malang meliputi belanja barang dan peralatan kantor. Secara berurutan pada Polsek X Malang pada tahun 2019-2022 sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran belanja barang telah optimal disusun dengan rapi agar terealisasi dengan baik pada tiap tahun anggaran di Polsek X Malang (Muhyiddin, S.Ak., M.Ak).

Sisa antara anggaran dan realisasi anggaran pada satuan kerja Polsek X Malang pada setiap tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 pada uraian alat dan barang diperoleh hasil antara jumlah anggaran yang direncanakan dengan hasil realisasi selama periode tersebut diperoleh hasil sebesar Rp.1.223.195.000. Sisa Polsek X Malang yang terjadi yang diakibatkan oleh adanya kenaikan harga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Rasio kemandirian keuangan Polsek X Malang menunjukkan kemampuan satuan kerja dalam memperoleh pendapatan yang dapat mendukung kebutuhan operasionalnya. Rasio ini dipengaruhi oleh tingginya atau rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya rasio kemandirian mengindikasikan ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer, sementara tingginya rasio mencerminkan kemandirian keuangan yang lebih baik. Rasio efisiensi di Polsek X Malang digunakan untuk mengukur seberapa efektif anggaran digunakan dalam operasional. Pada tahun 2019 dan 2020, rasio efisiensi menunjukkan pengeluaran yang cukup efisien, namun pada tahun 2021 terjadi over-budget yang menunjukkan pengeluaran melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan pentingnya perencanaan dan pengelolaan anggaran yang lebih baik untuk mencapai efisiensi yang optimal.

Saran

1. Polsek X Malang perlu meningkatkan kemandirian keuangan dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lokal. Diversifikasi sumber pendapatan melalui kerjasama dengan sektor swasta atau inisiatif lokal dapat mengurangi ketergantungan pada dana transfer dan meningkatkan stabilitas keuangan.
2. Untuk mengatasi ketidakseimbangan anggaran yang terjadi pada tahun 2021, penting untuk memperbaiki perencanaan anggaran dengan menggunakan data historis yang lebih akurat. Implementasi sistem pengelolaan keuangan yang lebih canggih dan pelatihan staf terkait pengelolaan anggaran juga diperlukan untuk memastikan penggunaan dana yang lebih efisien.
3. Mengadakan evaluasi dan audit berkala terhadap realisasi anggaran dan kinerja keuangan. Hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan serta memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan peruntukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. L-2.
- Aditya Nugroho dkk (2018) 'Pemenuhan Oksigenasi Otak Melalui Posisi Elevasi Kepala Pada Pasien Stroke Hemoragik By Beni.'
- Muhyiddin, S.Ak., M.Ak. *AKUNTANSI INFLASI DAN PERUBAHAN HARGA DI BERBAGAI NEGARA*.
- Ardianto, E. (2011). *Metode Penelitian Untuk Publik Relations Kuantitatif Dan Kualitatif (II)*. Simbiosis Rekatan Media.
- Awani, M. F., & Hariani, S. (2021). Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 95–102.
<https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i2.158>.
- Baswir, R. 2000. Akuntansi Pemerintahan Indonesia. BPFE. Yogyakarta.
- Bastian, Indra. (2005) Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Darminto. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. UPP STIM YKPN.
- Fahmi, I. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Alfabeta.
- Faqrurrowzi, L., Hidayati, T., & Budi. (2023). PENYELENGGARAAN MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN, ANTARA TRANSPARANSI DAN TEPAT GUNA. *Jurnal Serunai Ilmu Pendidikan*, 9(1), 88–96.
- Fitri, H. (2008). *Manfaat Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Bandung)*. Universitas Widyatama.
- Harahap, M. (2018). *Analisis Rasio Likuiditas Sebagai Alat Penilaian Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada PT Prodia Widyahusada Tbk*. Universitas Islam Negeri Sumatea Utara Medan.
- Hery. (2020). *Analisis Laporan Keuangan Integrated And Comprehensive Edition*.
- Hery. (2021). *Analisis Detail Dan Mendalam Atas Data Kuantitatif Laporan Keuangan*.
- Jumingan. (2017). *Analisa Laporan Keuangan*. PT. Bumi Aksara.
- Km, J. G. S. (n.d.). *ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA POLRES KUANTAN SINGINGI (Studi Kasus: Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi)*.
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan (Edisi Pertama)*. Rajawali Pers.
- Kasmir. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Rajawali Pers.
- Kawatu, F. S. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Deepublish.
- Kusumah, Wijaya dan Dedi Dwitagama. 2012. *Mengenal Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Indeks.

- Maith, H. A. (2013). Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. *Jurnal EMBA*, 1(3), 619–628.
- Mandasari, D. (n.d.). *UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 2017*.
- Mardiasmo (2002a). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Mohammad Mahsun, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, (Yogyakarta: BPFE, 2006), h. 196.
- Mhd Ichwan Cahyadi, Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Skripsi pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012, h. 27
- Mohammad Mahsun, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, (Yogyakarta: BPFE, 2006), h. 135
- Munawir, S. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. (Edisi Empat). Liberty.
- Munir, A. S. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia. *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 9(1).
- Nurhumaerah, N., Mas'ud, A., & Kalsum, U. (2023). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari. *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, 4(2), 221–235.
- Nuzullestary, V., & Mulyaningsih, E. (2021). *Kinerja Pengelolaan Keuangan Dan Tingkat Kemandirian Pemerintah Kota Cilegon Berdasarkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015-2019*.
- Orniati, Y. (n.d.). *Laporan Keuangan sebagai Alat untuk Menilai Kinerja Keuangan*.
- Prasetyowati, N., & Prihastiwi, D. A. (2022). Analisis Laporan Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan PT. Mandom Indonesia Tbk Tahun 2019. *Global Financial Accounting Journal*, 6(1), 1–12.
- Putri, B. G., & Munfaqiroh, S. (2020). *ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN*.
- Rhamadana, R. B. (2016). *ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAIN KINERJA KEUANGAN PADA PT. H.M SAMPOERNA Tbk*. 5.
- Rudianto. 2013. Akuntansi Manajemen Informasi untuk Pengambilan Keputusan Strategis. Jakarta: Erlangga
- Sujarweni, V. W. (2017). *Analisis Laporan Keuangan Teori, Aplikasi, Dan Hasil Penelitian*. Pustaka Baru Press.
- Susanto, H. (2019). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kota mataram. *Jurnal Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 7(1), 81-92.
- Tanjung, A. H. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Untuk SKPD. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 1, h. 3.
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2019). *Financial accounting*. John Wiley & Sons.